

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan ialah bagian akhir dari penelitian yang merangkum jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian secara ringkas dan langsung. Kesimpulan ini disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sehingga mencerminkan temuan utama dari penelitian. Dalam kesimpulan, peneliti memberikan penegasan mengenai hasil-hasil utama yang mendukung pemecahan masalah yang diteliti, serta menunjukkan kontribusi atau implikasi penting dari temuan tersebut. Kesimpulan juga harus jelas dan tidak menambahkan informasi baru yang belum dibahas dalam bagian analisis. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yaitu inventarisasi peralatan dan mesin di BPAD Provinsi DKI Jakarta sudah efektif. Berikut penjelasan kesimpulan dari setiap aspek:

1. Prosedur inventarisasi: BPAD mengacu pada pedoman yang tertuang dalam Permendagri No. 47 Tahun 2021 untuk memastikan proses inventarisasi dilakukan dengan cermat dan akurat. Setiap barang, terutama peralatan dan mesin, melalui verifikasi fisik untuk memastikan kondisi dan kelengkapan, kemudian dicatat dalam sistem informasi manajemen aset daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data aset, yang mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
2. Efektivitas sistem pencatatan dan pelaporan: Sistem ini terbukti efektif dalam memudahkan proses pencatatan, pelacakan, pembaruan, dan pelaporan status serta kondisi barang secara real-time. Sistem ini sangat mendukung keakuratan dan kelancaran proses inventarisasi, terutama untuk peralatan dan mesin, serta memungkinkan pemantauan yang cepat dan transparan terhadap perubahan atau pemindahan aset. Dengan demikian, sistem ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset daerah.
3. Mekanisme transparansi dalam proses inventarisasi: BPAD melibatkan seluruh pihak terkait, seperti Pengguna Barang (PB) dan Kuasa Pengguna Barang

(KPB), dalam setiap tahap proses inventarisasi. Sistem aplikasi khusus yang digunakan memungkinkan informasi terkait peralatan dan mesin, termasuk kondisi dan status penggunaannya, dapat diakses oleh Perangkat Daerah (PD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang relevan. Selain itu, laporan hasil inventarisasi disampaikan kepada pihak berwenang, termasuk auditor internal dan eksternal, serta pimpinan daerah, untuk memastikan proses berjalan dengan akuntabilitas yang tinggi dan transparansi yang jelas.

4. Tantangan memastikan akuntabilitas: Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi yang terlibat, seperti BPAD, dinas terkait, dan unit pengguna barang, menjadi hambatan signifikan. Hal ini mengakibatkan informasi aset tidak terintegrasi dengan baik, pencatatan yang tidak tepat waktu, dan pengawasan yang kurang akurat. Selain itu, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antar stakeholder, perbedaan prioritas, serta kurangnya keterlibatan dalam perencanaan sistem baru turut memperburuk situasi ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan koordinasi, perumusan peran yang jelas, serta keterlibatan aktif dari semua pihak dalam perencanaan dan implementasi sistem pengelolaan aset yang lebih terintegrasi.
5. Profesionalitas dalam proses inventarisasi: BPAD telah menyediakan berbagai alat dan sumber daya, seperti modul, pedoman operasional, dan video tutorial yang mudah diakses oleh semua pihak terkait. Sosialisasi rutin juga dilakukan di tingkat provinsi dan wilayah untuk memastikan pemahaman yang seragam mengenai prosedur inventarisasi. Selain itu, proses ini dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi berjenjang, mulai dari harian hingga triwulanan, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan inventarisasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan menghasilkan data yang akurat. Upaya ini menunjukkan komitmen BPAD untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD.
6. Upaya dalam proses inventarisasi: BPAD melaksanakan pelaporan secara sistematis dan transparan, sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 47 Tahun 2021. Setiap laporan mencakup rincian penting mengenai kondisi peralatan dan

mesin, lokasi, status penggunaannya, serta rekomendasi untuk pemeliharaan atau penghapusan barang yang tidak layak. Laporan ini disampaikan kepada pihak terkait, termasuk pimpinan daerah, lembaga pengawasan, dan auditor eksternal, guna memastikan bahwa pengelolaan BMD dilakukan dengan akuntabilitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, seluruh data dan laporan dapat diakses oleh pihak yang berwenang, mendukung transparansi dalam proses pengelolaan aset daerah.

7. Mekanisme pencatatan dan pelaporan setelah diinventarisasi: Data peralatan dan mesin akan dicatat dalam sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi, yang memungkinkan pemantauan dan pembaruan status barang secara real-time, termasuk pemindahan, perbaikan, atau penghapusan. Pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 47 Tahun 2021, dengan laporan yang mencakup kondisi, pemanfaatan, dan pengelolaan BMD. Laporan ini disampaikan kepada pimpinan daerah, lembaga audit, dan pihak terkait lainnya, serta dapat diakses untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Tindak lanjut dari laporan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjamin keberlanjutan pengelolaan BMD yang akuntabel dan efektif.

B. Saran

Saran adalah tindak lanjut yang diberikan berdasarkan kesimpulan penelitian, berupa rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait. Saran harus konkret, realistis, dan praktis, serta berorientasi langsung pada pemecahan masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian, saran seringkali menyangkut aspek kebijakan atau langkah operasional yang bisa diambil oleh pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan dampak nyata dan memperbaiki kondisi yang diteliti. Tujuannya adalah agar hasil penelitian tidak hanya menjadi pengetahuan teoritis tetapi juga dapat diaplikasikan untuk menghasilkan perubahan atau perbaikan dalam bidang yang bersangkutan.

Adapun saran dalam meningkatkan inventarisasi BMD di BPAD Provinsi Daerah Khusus Jakarta yaitu:

1. BPAD dapat membentuk tim koordinasi lintas departemen untuk meningkatkan integrasi data aset. Rapat berkala dan pembaruan informasi bisa difasilitasi melalui sistem digital terpadu yang memungkinkan berbagai pihak berbagi dan mengakses data secara real-time. Sistem ini sebaiknya memiliki pengaturan akses yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing stakeholder untuk menjaga akurasi dan keamanan informasi.
2. Untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan, penting untuk melibatkan stakeholder sejak awal dalam proses perencanaan inventarisasi. Ini bisa dilakukan melalui sosialisasi mengenai pentingnya sistem inventarisasi baru, pelatihan, dan dialog terbuka yang memungkinkan mereka memberikan masukan. Pendekatan ini akan membantu meningkatkan pemahaman, dukungan, dan kepemilikan (*ownership*) atas proses inventarisasi.
3. Menyusun dokumen yang secara jelas mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan target waktu setiap pihak dalam proses inventarisasi dapat mengurangi kebingungan.
4. Untuk mengatasi perbedaan prioritas antar stakeholder, BPAD perlu mengadakan diskusi bersama untuk menyamakan tujuan inventarisasi aset. Proses ini dapat mencakup penjelasan manfaat jangka panjang dari inventarisasi yang akurat dan transparan dalam pengelolaan aset. Dengan menyelaraskan visi dan tujuan, masing-masing pihak akan lebih memahami pentingnya mendukung proses inventarisasi.
5. BPAD dapat melakukan evaluasi rutin terhadap proses inventarisasi dan kinerja stakeholder terkait. Evaluasi ini berguna untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul serta memperbaiki proses inventarisasi secara terus-menerus. Dengan adanya evaluasi berkala, BPAD dapat mengadaptasi metode atau sistem inventarisasi sesuai kebutuhan tanpa mengorbankan prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mustakim, S. (2023). *Buku Ajar Manajemen Keuangan Daerah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Prasetia, I. (2022). *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*. Medan: Umsu Press.
- Priyono, P. E. (2022). *Komunikasi dan komunikasi digital*. Guepedia.
- Rukhmana, T., Darwis, D., Alatas, A. R., Tarigan, W. J., Mufidah, Z. R., Arifin, M., & Cahyadi, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: CV Rey Media Grafika.
- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Suraoka, I. P., Damanik, D., Efrina, G., Sari, R., Nengsi, A. R., Triansyah, F. A., & Massenga, T. W. (2023). *Metodologi Penelitian*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan. Berkelanjutan secara Nasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Teniwut, M. (2022). *Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian*. Media Indonesia.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

JURNAL

- Aira, A. (2014). Peran manajemen aset dalam pembangunan daerah. *Kutubkhanah*, 17(1), 21-39.
- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial.

Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, 5(2), 146-150.

Amiri, K. (2016). Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance. *Potret Pemikiran*, 20(2).

Annisa, N., Muthalib, A. A., & Hasnita, N. (2022). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Sigma: Journal of Economic and Business*, 5(2), 96-112.

Anugraini, P. S., & Puryandani, S. (2021). Implementasi Penghapusan Aset Tetap Dan Aset Tidak Berwujud Studi Kasus Pada BPPKAD Kabupaten Blora Tahun 2019. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 82-86.

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.

Asman, A., Akram, A., & Alamsyah, M. T. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 23-38.

Azhar, I. (2017). Pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 150-160.

Callysta, A. M., & Pakereng, M. A. I. (2022). Analisis Dan Perancangan Sistem Inventarisasi Aset Pada Pt. Bangunindo Teknusa Jaya. *Jurnal Tekinkom (Teknik Informasi dan Komputer)*, 5(1), 19-26.

Christian, F. (2019). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Merauke. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(1).

Ekawati, Y., Syafina, L., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengamanan Aset Tetap Kota Subussalam. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(3), 349-356.

Febriana, D., & Nawawi, A. (2024). Tinjauan Perhitungan Dan Pelaporan Penyusutan Aset Tetap Menggunakan PSAP 07 Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(5), 195-217.

- Frihatni, A. A., & Triani, N. (2020). Determinan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kementerian Keuangan Pada Satuan Kerja Wilayah Sulawesi Selatan. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 24-34.
- Hendrayady, A., Arman, A., Satmoko, N. D., Afriansyah, A., Heriyanto, H., Sholeh, C., & Razak, M. R. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik.
- Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70-78.
- Junitasari, P. D. K., Sari, D. M. I. P., & Dewi, N. D. A. K. P. (2024). Analisis Prosedur Penghapusan Aset Tetap Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2), 903-914.
- Karunia, R. L., & Ibrahim, M. M. (2021). Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap Di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. *Journal Of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 3(2), 66-76.
- Ma'ruf, K., Rohaeni, R., & Andani, D. (2023). Manajemen Aset Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 258-265.
- Meilasari, & Martadinata, S. (2020). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017-2019. *Journal Of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 15-25. <https://doi.org/https://doi.org/10.37673/jafa.v2i02.742>
- Nuryeti, N., Astriani, D., & Rachpriliani, A. (2024). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Guna Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Karawang). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 2420-2432.
- Ramdany, R., & Setiawati, Y. (2021). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN). *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 310-323.
- Rohmah, N., & Kholifah, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Taman Kanak-Kanak

Daerah Pedesaan. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(4), 535-541.

Saerang, D. P., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis Prosedur Inventarisasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(2), 108-117.

Sari, P., & Risriani, E. (2018). Peranan Penatausahaan Aset Tetap Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Aset Tetap Pada Kantor Bpn Kota Banjar. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1-15.

Syahrani, M. (2020). Membangun kepercayaan data dalam penelitian kualitatif. *Primary Education Journal (Pej)*, 4(2), 19-23.

Trianindita, D. A., Priyatiningsih, K., & Oktavia, H. C. (2022, August). Analisis Efektivitas Pengelolaan Inventarisasi Aset Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 13(1), 1250-1259.

Tukunang, S. C. (2016). Manajemen aset daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2).

Wartuny, S. (2020). Analisis pengelolaan aset pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22-33.

Wau, P. G. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) Nomor 7 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 21-30.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

BERITA

Widiyati, V. T. (2024, 15 Mei). Sekretaris Kota Jakarta Selatan Buka Secara Resmi Tahapan Pelaksanaan Inventarisasi BMD Berupa Peralatan dan Mesin. Diakses pada 15 Mei 2024, dari https://bpad.jakarta.go.id/portal/content/berita/9049/Sekretaris_Kota_Jakarta_Selatan_Buka_Secara_Resmi_Tahapan_Pelaksanaan_Inventarisasi_BMD_Berupa_Peralatan_dan_Mesin

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**